



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman
Tengah Kota Pariaman, 25511

Website: //diskominfo.pariamankota.go.id E-mail: diskominfo@pariamankota.go.id

Tanggal	18 Februari 2025	Media	Haluan
Kategori	PEMERINTAHAN	Jurnalis	h/mta

Harian Umum Independen

HALUAN

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KLIPING KORAN

HARI : Selasa

TANGGAL : 18 Februari 2025

GURU PPG KELUHKAN STATUS TMS

Pemko Pariaman Sebut Formasi Hanya untuk Honororer

PARIAMAN, HALUAN - Belasan calon pengajar dari Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman terkait status tidak memenuhi syarat atau TMS mereka pada seleksi administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II, Senin (17/2).

Audiensi digelar di ruang rapat gedung Balai Kota Pariaman dengan dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Roberia beserta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan jajaran lainnya.

Pada kesempatannya, guru PPG meminta kejelasan kepada Pj Wali Kota yang memberikan status TMS terhadap mereka dengan alasan mereka tidak terdata sebagai pengajar di sekolah yang ada di Kota Pariaman selayaknya persyaratan untuk guru honororer.

"Alasan TMS itu merujuk pada persyaratan guru honororer untuk PPPK, berbeda dengan guru PPG yang memang belum mengajar di penempatan yang dipilih saat Mapping. Sementara saat Mapping PPG ini, kami menemukan adanya kuota guru PPG di Pariaman," kata salah seorang guru PPG yang ikut audiensi.

Menurutnya, saat melakukan Mapping PPG untuk menentukan penempatan terdapat 17 kuota guru di Kota Pariaman. Oleh sebab itu, ia menganggap ada kebutuhan guru PPG pada seleksi PPPK di daerah tersebut.

Roberia mengatakan bahwa pihaknya tidak membuka kuota untuk PPG Prajabatan. Dalam menentukan formasi, ketersediaan kuota untuk PPPK guru didasarkan pada kebutuhan guru di setiap sekolah yang disinkronkan dengan jumlah honororer.

"Saya sendiri merasa tidak pernah menyetujui kuota untuk guru PPG prajabatan, sebab untuk PPPK kali ini pemko fokus untuk pada guru honororer yang terbukti mengabdikan selama dua tahun atau lebih. Kami memberikan status TMS karena pelamar dari guru PPG tidak pernah mengajar di sini," kata Roberia.

Ia menyebut, pemberian

